



## Strategic Role Of The Legal Bureau Of The Regional Secretariat Of Central Kalimantan Province In Harmonizing Draft Regional Regulations

### Peran Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

Debagus <sup>1)</sup>; M.Akhmal Al-Riski <sup>2)</sup>; Fitria Auliani Sagita <sup>3)</sup>; Dessy Sulistyawati <sup>4)</sup>; Imel Agustin <sup>5)</sup>; Kamal Hasuna <sup>6)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6)</sup> Universitas IAIN Palangka Raya, Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara  
Email: <sup>1)</sup> [debagus03@gmail.com](mailto:debagus03@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [12 Desember 2024]

Revised [25 Januari 2025]

Accepted [12 Maret 2025]

#### KEYWORDS

*Strategic Role, Harmonization Of RPDA, Regional Autonomy, Order Of Authority, Orderly Procedures, Relevant Substance.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Pada konteks implementasi otonomi daerah, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah berperan strategis dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah (RPD). Melalui penelitian kualitatif, dipaparkan bagaimana Biro Hukum menjalankan tanggung jawabnya dalam menyelaras, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan konsep RPDA dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat, atau lebih rendah. Biro Hukum ini merupakan instansi vertikal yang aktif dalam harmonisasi RPD, memastikan bahwa RPDA disusun secara sistematis tanpa saling bertentangan atau tumpang-tindih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Biro Hukum sangat efektif dalam memantau proses harmonisasi RPD sesuai dengan unsur-unsurnya, seperti tertib kewenangan, tertib prosedur, serta substansi yang relevan.

#### ABSTRACT

*In the context of the implementation of regional autonomy, the Legal Bureau of the Central Kalimantan Provincial Secretariat plays a strategic role in harmonizing the draft regional regulations (RPD). Through qualitative research, it is explained how the Legal Bureau carries out its responsibilities in harmonizing, adjusting, consolidating, and rounding the concept of RPDA with higher, equivalent, or lower laws and regulations. This Legal Bureau is a vertical agency that is active in harmonizing RPDs, ensuring that RPDs are prepared systematically without conflicting or overlapping with each other. The results of the study show that the role of the Legal Bureau is very effective in monitoring the RPD harmonization process in accordance with its elements, such as the order of authority, orderly procedures, and relevant substances.*

## PENDAHULUAN

Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (Raperda), yang merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks otonomi daerah, Biro Hukum berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan menyelaraskan Raperda dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga dapat menciptakan peraturan yang tidak hanya sesuai secara hukum tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

### 1. Peran Biro Hukum dalam Harmonisasi Raperda

Harmonisasi Raperda adalah proses untuk menyelaraskan rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta menghindari tumpang tindih atau konflik antara berbagai regulasi. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah berperan sebagai instansi vertikal yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan harmonisasi ini. Tugas utama mereka mencakup analisis substansi Raperda, termasuk politik hukum, materi muatan, dan asas hukum yang harus dipatuhi Langkah-Langkah Harmonisasi.

Proses harmonisasi dilakukan melalui beberapa langkah penting:

- Tertib Kewenangan Memastikan bahwa setiap tindakan dalam pembentukan Raperda dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang sah.
- Tertib Prosedur Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk memastikan bahwa semua langkah diambil secara sistematis dan sesuai aturan.
- Tertib Substansi Melakukan analisis mendalam terhadap isi Raperda untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai hukum dan sosial yang berlaku di masyarakat.

### 2. Signifikansi Peran Biro Hukum

Peran strategis Biro Hukum tidak hanya terbatas pada aspek teknis harmonisasi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang

berkualitas. Dengan adanya harmonisasi, diharapkan Raperda yang dihasilkan dapat mendukung pembangunan daerah secara efektif, serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk menghindari potensi judicial review yang dapat merugikan daerah baik dari segi anggaran maupun waktu. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa kepentingan publik terakomodasi dalam setiap regulasi yang disusun. Dengan demikian, harmonisasi Raperda menjadi salah satu mekanisme penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

## LANDASAN TEORI

### Peran Strategis

Peran strategis merujuk pada fungsi atau kedudukan yang memiliki pengaruh besar dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan atau organisasi, peran strategis berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan, program, atau individu berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

### Harmonisasi RPDA

Harmonisasi RPDA (Rencana Pembangunan Daerah) adalah proses penyesuaian kebijakan, program, dan strategi pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta kebutuhan lokal. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya kesinambungan, konsistensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah.

### Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### Urutan Kewenangan

Urutan kewenangan adalah hierarki atau tahapan dalam pembagian wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga terkait lainnya. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang jelas sehingga setiap pihak memahami batasan serta tanggung jawabnya dalam menjalankan suatu kebijakan atau program.

### Tata Urutan Prosedur

Tata urutan prosedur merupakan serangkaian langkah atau tahapan sistematis yang harus diikuti dalam menjalankan suatu kegiatan atau kebijakan. Urutan ini dibuat agar proses dapat berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

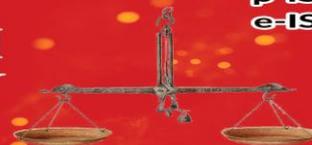
### Substansi yang Relevan

Substansi yang relevan mengacu pada isi atau materi yang memiliki keterkaitan langsung dengan suatu topik atau permasalahan yang dibahas. Dalam konteks regulasi atau kebijakan, substansi yang relevan adalah muatan yang sesuai dengan kebutuhan serta tujuan yang ingin dicapai.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai Peran Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai peran dan fungsi Biro Hukum dalam proses harmonisasi Raperda. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang menggambarkan realitas dan kompleksitas proses harmonisasi Raperda secara lebih mendalam, serta mendapatkan wawasan tentang tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh Biro Hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk memastikan validitas data, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dan observasi. Selain itu, peneliti juga akan melakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan beberapa informan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (Raperda). Tantangan-tantangan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yang mencakup aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas harmonisasi.

### 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Biro Hukum. Banyak tenaga perancang peraturan yang masih minim pengalaman dan spesialisasi di bidang hukum tertentu, sehingga menghambat proses penyusunan Raperda yang berkualitas. Selain itu, beban kerja yang tinggi dan kurangnya pelatihan berkelanjutan juga memperburuk situasi ini, membuat proses harmonisasi menjadi kurang efisien.

### 2. Proses Pembahasan yang Panjang

Proses pembahasan Raperda di DPRD seringkali memakan waktu lama, yang dapat disebabkan oleh sibuknya anggota DPRD dengan tugas lain, seperti pengawasan dan penganggaran. Hal ini semakin rumit menjelang pemilihan umum, ketika fokus anggota DPRD terbagi antara tugas legislatif dan kampanye politik. Keterlambatan dalam pembahasan dapat menyebabkan Raperda tidak dapat disahkan tepat waktu, sehingga mengganggu agenda pembangunan daerah.

### 3. Ketidaksiharian dengan Peraturan yang Lebih Tinggi

Biro Hukum juga harus memastikan bahwa setiap Raperda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, sering kali terdapat ketidaksiharian antara materi muatan Raperda dengan regulasi nasional atau daerah lain, yang dapat menyebabkan disharmonisasi hukum. Hal ini berpotensi mengakibatkan pembatalan Raperda oleh Kementerian Dalam Negeri, seperti yang terjadi pada 73 peraturan daerah di Kalimantan Tengah yang dibatalkan karena tidak memenuhi kriteria hukum. Kurangnya Anggaran untuk Proses Pembentukan Peraturan Tantangan lain adalah kurangnya anggaran untuk mendukung proses pembentukan Raperda. Pembiayaan untuk penyusunan naskah akademik dan kajian mendalam sering kali baru tersedia setelah program pembentukan peraturan ditetapkan, sehingga menghambat langkah awal yang diperlukan untuk menghasilkan Raperda berkualitas. Tanpa dukungan finansial yang memadai, proses harmonisasi menjadi terhambat.

### 4. Partisipasi Masyarakat yang Terbatas

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Raperda juga sering kali kurang optimal. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dengan baik dalam regulasi yang disusun. Namun, kurangnya mekanisme partisipatif membuat suara masyarakat sering kali tidak terdengar dalam proses harmonisasi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam berbagai aspek untuk meningkatkan efektivitas harmonisasi Raperda. Upaya peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan proses pembahasan, serta penguatan anggaran dan partisipasi masyarakat adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk mencapai tujuan harmonisasi yang optimal dan menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah memegang peran strategis dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah (Raperda). Tugas utamanya adalah menyelaraskan Raperda dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan peraturan yang legal, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses harmonisasi melibatkan analisis substansi, kepatuhan terhadap kewenangan hukum, dan prosedur penyusunan yang tertib.

Peran Biro Hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk menyusun regulasi berkualitas yang mendukung pembangunan daerah dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksiharian dengan regulasi yang lebih tinggi, anggaran yang minim, partisipasi masyarakat yang terbatas, serta proses pembahasan yang panjang, sering menghambat efektivitas harmonisasi. Upaya perbaikan diperlukan, termasuk peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran, dan pelibatan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Biro Hukum dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dan menghasilkan regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Konig, Pascal D., and Georg Wenzelburger. "Between technochauvinism and human-centrism: Can algorithms improve decision-making in democratic politics?." *European Political Science* (2022): 1-18.
- Jayuska, Rizki, and Ismail Marzuki. "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021." *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (2021): 149–67. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464>.
- Sri Magdalena Hutabalian. "Peran Biro Hukum Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Studi Di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah)." *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 5, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.37304/jispar.v5i1.393>.
- Trein, Philipp, Martino Maggetti, and Iris Meyer. "Necessary conditions for policy integration and administrative coordination reforms: An exploratory analysis." *Journal of European Public Policy* 28.9 (2021): 1410-1431.
- Wenzelburger, Georg. *The partisan politics of law and order*. Oxford University Press, USA, 2020.
- Wirtz, Bernd W., Paul F. Langer, and Carolina Fenner. "Artificial intelligence in the public sector-a research agenda." *International Journal of Public Administration* 44.13 (2021): 1103-1128.
- Yang, Liu, and Jian Wang. "Factors influencing initial public acceptance of integrating the ChatGPT-type model with government services." *Kybernetes* 53.11 (2024): 4948-4975